

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU/JURNAL/MAKALAH

- A. Suriyaman Mustari Pide, 2009, *Quo Vadis Pendaftaran Tanah*, Makassar, PUKAP-Indonesia.
- A.P. Parlindungan, 1980, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung, Alumni.
- .....2009, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Bandung, Rajawali Mandar Maju.
- .....2002, *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2007, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Achmad Rubaie, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Malang, Bayumedia.
- Ahmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Boedi Harsono, 1971, *Undang-Undang Pokok Agraria Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya Jilid II*, Jakarta, Djambatan.
- .....2003, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Jakarta. Djambatan.
- .....2008, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- Bachtiar Effendi, 1993, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung, Alumni.
- Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Pusat Penerbit LPPM Universitas Islam, Bandung.

- Effendi Peranginangin, 1986, *Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta, CV Rajawali.
- .....1991, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- .....1994, *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Eddy Ruchiyat, 1984, *Sistem Pendaftaran Tanah Sesudah Dan Sebelum UUPA*, Bandung, Armico.
- Eli Wuria Dewio, 2014, *Mudahnya Mengurus Sertifikat Tanah Dan Segala Perizinanya*, Yogyakarta, Buku Pintar.
- Farida Patittingi, 2011, *Penegasan Alas Hak Penguasaan Fisik Turun-temurun Dalam Praktik Pendaftaran Tanah, Amanna Gappa*, Volume 19 Nomor 4, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Geraldus Sulianto, 2020, *Penguasaan Tanah Bekas Hak Eigendom Verponding Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1401 K/Pdt/2018)*, Jakarta, Universitas Tarumanagara.
- Gunanegara, 2017, *Hukum Pidana Agraria Logika Hukum Pemberian Hak Atas Tanah dan Ancaman Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Tstanusa.
- H. Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan (Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat Dan Permasalahannya)*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Herman Kermit, 2004, *Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Tentang Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda*, Bandung, Mandar Maju.
- .....2009, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah*, Bandung, Maju Mundur.
- Hasan Basri, 1989, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Jakarta, Bina Cipta.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Piihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media.

- Jan Michiel Otto, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, terjemahan Tristam Moeliono, Jakarta, Komisi Hukum Nasional.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- K. Wantjik Saleh, 2003, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Muhammad Ilham Arisaputra, 2015, *Reforma Agraria Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muhammad Yamin Lubis. 2008. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung, Mandar Maju.
- Ni Made Silvia Gayatri, et.al., 2021, Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat Administrasi, Denpasar, Universitas Warmadewa.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
- Philipus M. Hadjon, 1985, *Pengantar Hukum Administerasi Indonesia*, Ponorogo, Bina Ilmu.
- Philipus M, Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Rusmadi Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Cetakan I, Bandung, Alumi.
- Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang- Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Syafruddin Chandra, 2005, *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Persyaratan Permohonan Di Kantor Pertanahan*, Jakarta, Grasindo.
- Syamsul Bahri, 2006, *Hukum Agraria Indonesia Dulu dan Kini*, Padang, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Andalas.

- Sahman, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Jakarta, Universitas Indonesia.
- .....1998, *Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik, Hak Sewa Guna dan Hak Guna Bangunan*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Sdikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Satjipto Raharjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Jakarta, Kencana.
- Soetomo, 2004, *Pedoman Jual Beli Tanah, Peralihan Hak Dan Sertifikat*, Malang, Universitas Brawijaya.
- Subekti, 2003, *Pokok- Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermasa.
- Suparman, 2017, *Peranan Undang – Undang Pokok Agraria Bagi Masyarakat Indonesia yang Bersifat Agraris*, Jakarta, Jurnal Warta.
- Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area University Press, Medan.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Keduabelas, Alfabeta, Bandung.
- Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius.
- Urip Santoso, 2015, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Jakarta Prenadamedia Group.
- .....2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta Kencana Prenadamedia Group.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke wetboek/BW*)

Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak Barat, dan sebagai tindak lanjutnya telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVI/2018

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri 3/1997

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria

Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah

### **C. SUMBER INTERNET**

<http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062>